



# LAPORAN KINERJA

---

**2015**

---

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**



## **DAFTAR ISI**

<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA</b>	<b>6</b>
<b>III.</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>9</b>
<b>IV.</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>17</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Disamping itu, setiap Anggota DPR mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR RI tersebut, dibentuk Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 23 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang didalam tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Adapun tugas dari Setjen DPR RI adalah menyelenggarakan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR RI. Dukungan keahlian Setjen DPR RI disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPR RI di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Sekretaris Jenderal merupakan koordinator, pembina, dan pengambil kebijakan dalam lingkungan Setjen DPR RI. Dalam pelaksanaannya, Sekjen dibantu empat Deputi yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda yang membawahi berbagai biro-biro, salah satu deputi yaitu Deputi bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen yang membawahi Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP).

Untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, telah dibentuk berbagai peraturan seperti Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Sekjen DPR RI No. 400 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Setjen DPR RI yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekjen No. 3 Tahun 2010 dan diperbaharui lagi dengan peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dimana Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Persidangan. Dari beberapa peraturan tersebut, dikemukakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerinah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kerja Sama Antar Parlemen tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban Biro untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen di masa yang akan datang.

## **B. KELEMBAGAAN**

### **1. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 3/PERSEKJEN/2010 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015, Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan.

### **2. TUGAS POKOK**

Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan analisa terhadap isu-isu bilateral, regional dan internasional serta kesekretariatan Kerja Sama antar parlemen.

### **3. FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai fungsi :

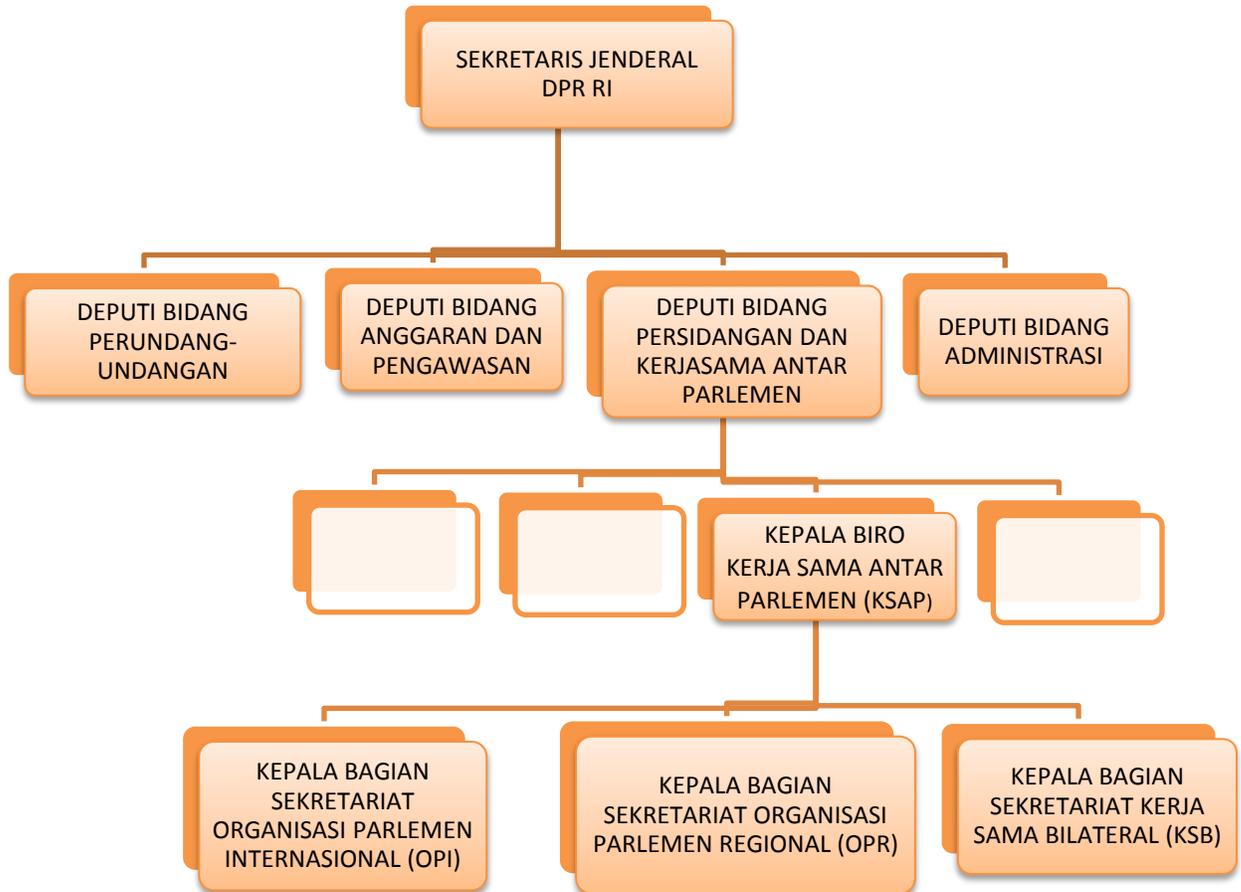
- a. Penyelenggaraan analisis isu-isu bilateral, pelayanan rapat dan administrasi desk Kerja Sama bilateral, kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan penerimaan tamu/delegasi parlemen negara lain, kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI serta kegiatan alih bahasa.
- b. Penyelenggaraan analisis terhadap isu-isu regional, pelayanan rapat desk Kerja Sama Regional yang meliputi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, dan organisasi parlemen regional lainnya, serta menyelenggarakan administrasi Kerja Sama AIPA, APPF, APA dan organisasi parlemen regional lainnya;
- c. Penyelenggaraan analisis terhadap isu-isu internasional, pelayanan rapat desk Kerja Sama internasional yang meliputi *Inter Parliamentary Union (IPU)*, *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*, *Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)*, dan organisasi internasional lainnya, Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk, dan *Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP)*, serta menyelenggarakan administrasi Kerja Sama IPU, PBB, PUIC dan organisasi parlemen internasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk dan ASGP.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dibantu oleh :

1. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral (KSB);
2. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional (OPR);
3. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional (OPI).

#### D. BAGAN ORGANISASI BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN



#### E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan laporan pencapaian kinerja Biro KSAP selama tahun 2015. Capaian kinerja 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut maka sistematika penyajian LAKIP Biro KSAP adalah sebagai berikut :

- Bab I            PENDAHULUAN  
Menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis dan struktur organisasi.
- Bab II            RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN PENETAPAN KINERJA  
Menjelaskan Rencana Strategis Biro KSAP tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.
- Bab III           AKUNTABILITAS KINERJA  
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja (mikro) Biro KSAP dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015.
- Bab IV           PENUTUP  
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas Kinerja Biro KSAP tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

Biro Kerja Sama Antar Parlemen pada tahun 2015, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

#### **A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap tiga fungsi DPR RI, program kerja Biro KSAP mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen dan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015 – 2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

##### **1. Visi**

Rumusan visi dan misi Biro Kerja Sama Antar Parlemen mengacu pada visi dan misi Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu menyiapkan dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang Persidangan dan Kerja Sama antar Parlemen, sehingga visi Biro KSAP adalah:

**”TERWUJUDNYA DUKUNGAN KEGIATAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN YANG  
PROFESIONAL DAN AKUNTABEL”**

##### **2. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro KSAP, yaitu:

- a. Mewujudkan analisis isu-isu bilateral, yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat, serta alih bahasa yang akurat.

- b. Mewujudkan analisis isu-isu regional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- c. Mewujudkan analisis isu-isu internasional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- d. Mengembangkan Database yang akurat dan informasi terbaru untuk mendukung kegiatan kerja sama antar parlemen.

### **3. Tujuan**

- a. Meningkatkan hasil analisis isu-isu bilateral, regional dan internasional yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi BKSAP.
- b. Meningkatkan dukungan teknis, administrasi dan alih bahasa yang berkualitas dan tepat waktu .

Dengan mengacu pada tujuan tersebut, Biro KSAP dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

### **4. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh Biro KSAP yaitu:

Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan kerja sama antar parlemen yang akurat dan tepat waktu kepada DPR RI

Dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Persentase dukungan terhadap pelaksanaan rapat-rapat BKSAP yang sesuai standar dan tepat waktu;
2. Persentase dukungan kegiatan penerimaan delegasi dan kunjungan kerja luar negeri serta dukungan kegiatan alih bahasa sesuai standar dan optimal;
3. Persentase hasil analisis terhadap isu bilateral, regional dan internasional sesuai standar dan tepat waktu;
4. Persentase penyusunan laporan kunjungan kerja luar negeri, sidang regional dan internasional yang disusun sesuai standar dan tepat waktu.
5. Persentase dukungan penyelenggaraan sidang regional/internasional dimana DPR RI menjadi tuan rumah.

Target 2016: 100%

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Biro KSAP telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan kinerja Biro KSAP disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan.

Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat sasaran-sasaran strategis Deputy Persidangan dan KSAP tahun 2015-2019.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Berdasarkan Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya rapat-rapat BKSAP, baik rapat Pimpinan BKSAP, rapat Pleno BKSAP, rapat GKSDB DPR RI maupun rapat-rapat pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pengiriman delegasi ke luar negeri, penerimaan tamu luar negeri, serta penyelenggaraan konferensi regional dan internasional dimana DPR RI sebagai tuan rumah, telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 100%;
- b. Meningkatnya dukungan pelayanan terhadap rapat Pimpinan BKSAP, rapat Pleno BKSAP, rapat GKSDB dan rapat-rapat delegasi, serta pengiriman delegasi ke luar negeri, baik delegasi muhibah, teknis bilateral, konferensi regional dan internasional. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 100%;
- c. Meningkatnya dukungan pelayanan terhadap penerimaan tamu BKSAP atau delegasi parlemen negara sahabat (*friendly talk*), baik resmi maupun tidak resmi. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 100%.
- d. Terselenggaranya konferensi regional maupun internasional dimana DPR RI menjadi tuan rumah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 100%.
- e. Terlaksananya kegiatan alih bahasa yang tepat waktu dan akuntabel. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 100%.

## B. EVALUASI KINERJA

Analisis capaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran dan kegiatannya. Oleh karena itu analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun indikator dan capaian kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase dukungan kegiatan Kerja Sama Antar Parlemen dalam lingkup bilateral, regional, dan internasional sesuai standar dan tepat waktu.	100%	100%	100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan output yang dihasilkan di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. DPR-RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Konfrensi Parlemen Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 25 April 2015, di Jakarta.
2. DPR-RI menjadi Tuan Rumah penyelenggaraan Sidang *The Sixth Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* tanggal 5 – 8 Oktober 2015 di Yogyakarta.
3. Terselenggaranya kegiatan Kerja Sama Bilateral (KSB) dengan baik dan lancar, termasuk dalamnya pengiriman delegasi GKSAP DPR RI ke Parlemen negara sahabat, penerimaan tamu (*friendly talk*), pelaksanaan Seminar BKSAP dan alih bahasa/penerjemahan, sebagai berikut :

### A. PENGIRIMAN DELEGASI TEKNIS BKSAP

- 1) Kunjungan Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Ceko 24 – 30 Mei 2015.
- 2) Kunjungan Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Mexico 14 – 20 September 2015

## **B. PENGIRIMAN DELEGASI GKSB**

- 1) Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Italia ke Italia tanggal 22 – 28 November 2015.
- 2) Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Libanon ke Libanon tanggal 10 – 16 Desember 2015.
- 3) Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Iran ke Iran tanggal 10 – 16 Desember 2015.
- 4) Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Austria ke Austria tanggal 13 – 19 Desember 2015.

## **C. PENERIMAAN TAMU (*FRIENDLY TALK*) DELEGASI PARLEMEN NEGARA SAHABAT**

- 1) Tanggal 3 Februari 2015 , GKSB DPR RI – Parlemen Saudi Arabia menerima Delegasi Parlemen Majelis Ash Shura Arab Saudi .
- 2) Tanggal 27 Januari 2015 , Deputy Persidangan dan KSAP menerima kunjungan delegasi Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand.
- 3) Tanggal 23 Februari 2015 , Ketua BKSAP (Ibu DR. Nurhayati Ali Assegaf) menerima Delegasi Senator Canada yang dipimpin oleh Ketua Delegasi, Senator Raynell Andreychuck.
- 4) Tanggal 24 Maret 2015, Ketua BKSAP (Ibu DR. Nurhayati Ali Assegaf) menerima Delegasi OECD yang dipimpin Oleh Ms. Tatyana Teplova.
- 5) Tanggal 24 maret 2015, Ketua DPR RI (Bpk Satya Novanto) menerima Ketua Dewan Parlemen Bahrain, H.E. Mr. Ahmed bin Ebrahim Rashid Al Mulla.
- 6) Tanggal 27 Mei 2015, Ketua BKSAP (Ibu DR. Nurhayati Ali Assegaf) menerima Delegasi wakil rektor Universitas Guang Dong, Hon.Mr Yang Aimin.
- 7) Tanggal 23 April 2015, Ketua DPR RI (Bpk Satya Novanto) menerima Delegasi Parlemen Sudan.
- 8) Tanggal 23 April 2015, Ketua DPR RI (Bpk Satya Novanto) menerima Delegasi Parlemen Vanuatu.
- 9) Tanggal 23 April 2015, Ketua DPR RI (Bpk Satya Novanto) menerima Delegasi parlemen Tomor Leste.
- 10) Tanggal 6 Juni 2015, Ketua BKSAP (Ibu DR. Nurhayati Ali Assegaf) menerima para Duta Besar negara sahabat.
- 11) Tanggal 6 Juni 2015, Ketua BKSAP (Ibu DR. Nurhayati Ali Assegaf) menerima para Duta Besar negara sahabat kawasan Asia.
- 12) Tanggal 26 Agustus 2015, Ketua DPR RI (Bpk Satya Novanto) menerima Perdana menteri Tomor Leste.

- 13) Tanggal 28 September 2015, Sekjen DPR RI ( Ibu Dr. Winantuningtyastiti S. menerima Duta Besar Negara Italia. (HE.Mr. Federico Faila) dalam rangka persiapan kedatangan Presiden negara Italia.
- 14) Tanggal 2 Oktober 2015, Ketua GKSB Parlemen mongolia (Bpk Mohammad Hatta) menerima Duta Besar Mongolia Shagdar battsetseg)
- 15) Tanggal 13 Oktober 2015, Ketua GKSB parlemen Ukraiana (Bpk Donny Imam Priambodo, menerima Duta Besar Ukraiana (Y.M. volodimir Pakhil)

### C. DIALOG BKSAP

- 1) Hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, BKSAP menyelenggarakan *event* bertempat di Operation Room gedung Nusantara, yaitu seminar dalam rangka memperingati *International Women's Day*.
- 2) Hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, BKSAP menyelenggarakan *even The 2<sup>nd</sup> China – Shouththeast Asia High Level people – to – People Dialogue*, di Nusa Dua Bali

### D. PELAKSANAAN KEGIATAN ALIH BAHASA/PENERJEMAHAN

#### 1) Daftar Kegiatan Penerjemahan Tertulis

No	Jenis teks	Jumlah teks	Keterangan
1	dokumen bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya seperti : buku, pidato, Laporan,surat-surat dari negara lain,surat Indonesia-Inggris, MoU, <i>Agreed Minutes of Meeting, Joint Statement, Term of References</i> , terjemahan produk hukum, terjemahan ilmiah, terjemahan presentasi dan CV Indonesia-Inggris	540 dokumen dan Surat	Dari masing-masing dokumen dan surat bervariasi jumlah halamannya, mulai dari 1 lembar sampai puluhan halaman, bahkan ratusan halaman. Untuk yang sudah ratusan halaman dilakukan <i>outsourcing</i> , Penerjemah Muda hanya melakukan <i>editing</i> dari penerjemah luar.

## 2) Daftar Kegiatan Penerjemahan Lisan

No.	Jenis	Jumlah acara/hari
	<b>Terjemahan lisan teknik konsekutif dan simultan</b>	
1	Menerima tamu-tamu asing dengan rincian: bahasa berbahasa Arab dan bahasa Inggris,	66
	a. Penerjemahan lisan berbahasa Arab	2 acara
	b. Penerjemahan lisan berbahasa Inggris	64 acara

4. Terselenggaranya kegiatan Organisasi Parlemen Regional (OPR) dengan baik dan lancar, termasuk didalamnya pengiriman delegasi-delegasi menghadiri berbagai sidang regional ke berbagai Negara, penyelenggaraan seminar, serta penerimaan tamu parlemen negara sahabat, yaitu:

1. Sidang tahunan ke-23 *Asia Pasific Parliamentary Forum* (APPF) tanggal 8 -17 Januari 2015 di Quito, Ekuador
2. Sidang *APA Standing Committee on Political Affair*, tanggal 19 – 20 Maret 2015 di Ankara, Turkey.
3. *ASEAN People's Forum*, tanggal 25 April 2015, di Malaysia.
4. *ASEAN leaders meeting with the Representatives of ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*, tanggal 25 – 28 April 2015, di Malaysia.
5. Sidang *AIFOCOM* , tanggal 7 – 11 Juni 2015 di Malaysia.
6. Sidang *AIPA Caucus*, tanggal 26 – 30 Juli 2015 di Siam Rep, Kamboja.
7. Sidang umum ke-33 *AIPA*, tanggal 6 – 12 September 2015, di Kaula Lumpur, Malaysia.
8. Sidang Pleno *APA* tanggal 7 – 12 Desember 2015 di Kamboja.

5. Terselenggaranya kegiatan Organisasi Parlemen Internasional (OPI) dengan baik dan lancar, termasuk didalamnya pengiriman delegasi-delegasi menghadiri berbagai sidang internasional ke berbagai negara, yaitu:

- 1) *The 10<sup>th</sup> session of The PUIC Confrence and Related Meeting*, tanggal 16 – 23 Januari 2015, di Istambul Turkey.
- 2) *The High-level Thematic Debate on Means of Implementation for Transformative Post-2015 Development Agenda*, tanggal 9 - 10 Februari 2015, di New York, Amerika Serikat.

- 3) *Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO)*, 16 - 17 Februari 2015 di Jenewa, Swiss.
  - 4) *The 3rd OECD Parliamentary Days*, 25 - 27 Februari 2015 di Paris, Prancis.
  - 5) *Seminar for Asia Pacific on Translating International Rights Commitment into National Realities: The Contribution of Parliament to the work of the UNHCR*, 26 - 27 Februari 2015.
  - 6) *Commission on the Status of Women*, New York, 9 - 13 Maret 2015.
  - 7) *Parliamentary Meeting at the Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction*, tanggal 13 Maret 2015 di Sendai, Jepang.
  - 8) *The 132nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and related meetings* tanggal 28 Maret - 2 April 2015, Hanoi, Vietnam.
  - 9) *Global Parliamentary Conference of the Parliamentary on the world Bank & IMF*, 12-13 April 2105, di Amerika Serikat.
  - 10) Sidang *Global Parliament of Young Parliamentary* tanggal. 25-29 Mei 2015. di Jepang.
  - 11) *4th World Speaker Conference*, Amerika Serikat, 29 Aug -2 Sept 2015
  - 12) *Parliamentary Session within the Framework of the Annual WTO Public Forum and the 34th Session of the Steering Committee of the PCWTO* di Jenewa, Swiss tgl 28 September - 2 Oktober 2015.
  - 13) *IPU 133rd Assembly and Related Meetings* di Jenewa, Swiss tanggal 15 - 22 Oktober 2015.
  - 14) *Parliamentary Meeting on the occasion of the UN Climate Change Conference*, di Paris, Perancis 3 – 7 Desember 2015.
6. Terselenggaranya dukungan pelaksanaan kegiatan BKSAP dengan baik dan lancar, termasuk di antaranya pengiriman delegasi Setjen DPR RI ke Sidang *IPU Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP)* di Hanoi, Vietnam tanggal 29 Maret – 1 April 2015.

Berdasarkan evaluasi kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dalam tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2015 semua kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif pada visi dan misi Biro KSAP. Namun, mengingat kegiatan Sekretariat Jenderal DPR sangat tergantung pada kegiatan Dewan, tentunya seluruh kebijakan/keputusan yang diambil oleh Pimpinan/Anggota Dewan akan berpengaruh pula pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang dampaknya akan tergambar pada kinerja Sekretariat.

Untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya maka Biro KSAP lebih mengintensifkan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk mengedepankan profesionalisme kerja dan kualitas SDM. Dengan demikian diharapkan kinerja Biro KSAP dapat meningkat.

### **C. ASPEK KEUANGAN**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro KSAP ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro KSAP melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya, kembali lagi ke tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu sebagai Sekretariat yang memberikan dukungan terhadap tiga fungsi Dewan, maka penggunaan anggaran juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan DPRRI.

Pagu anggaran yang dikelola oleh BKSAP adalah sebesar **Rp.129.013.410.000,-** dan realisasi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar **Rp.52.386.457.306,-** atau **40,61%** dari pagu anggaran. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Penyelenggaraan sidang/Konferensi Internasional di dalam negeri terdiri dari :**

1. Terselenggaranya sidang Konferensi Parlemen Asia Afrika tanggal 19 – 25 April 2015 di Jakarta.
2. Terselenggaranya Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development* tanggal 19 – 20 Agustus 2015 di Jakarta.
3. Penyelenggaraan Sidang *Sixth Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC)*, tanggal 5 – 8 Oktober 2015 di Jogjakarta.

#### **b. Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar negeri terdiri dari :**

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Bilateral.
2. Pelaksanaan kegiatan Organisasi Parlemen Regional.
3. Pelaksanaan kegiatan Organisasi Parlemen Internasional.
4. Dukungan pelaksanaan kegiatan BKSAP.

Dari hasil monitoring persentase dukungan kegiatan Kerja Sama Antar Parlemen dalam lingkup bilateral, regional, dan internasional sesuai standar dan tepat waktu, mencapai 100%.

Kinerja tersebut didukung pagu anggaran DPR-RI sebesar **Rp.129.013.410.00,-** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **Rp. 52.386.457.306,-** atau **40,61%**. Anggaran tidak terserap 100% karena ada beberapa kegiatan Dewan yang tidak terlaksana seperti misalnya pengiriman Delegasi DPR RI ke sidang internasional dan pengiriman Delegasi GKSB DPR RI. Walaupun persiapan kegiatannya sudah dilaksanakan oleh Sekretariat namun hal tersebut tidak mengurangi kinerja Biro KSAP dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPR-RI.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro KSAP tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro KSAP tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan kepada Anggota Dewan untuk lebih baik lagi. Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

### **A. KEBERHASILAN**

Keberhasilan yang dicapai antara lain:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan-bahan terkait dengan substansi mengenai isu-isu bilateral, regional dan internasional;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dukungan kegiatan kerjasama antar parlemen;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan alih bahasa/penerjemahan;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dukungan kepada DPR RI sebagai tuan rumah penyelenggara sidang-sidang parlemen regional/ internasional sehingga sidang berlangsung sukses dan lancar.

### **B. HAMBATAN DAN MASALAH**

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Biro KSAP telah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada DPR RI, khususnya kepada Pimpinan dan Anggota BKSAP. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain dukungan teknologi dan sarana/prasarana yang kurang memadai serta kurangnya peningkatan kualitas SDM pegawai. Hal tersebut terkait erat dengan tugas dan fungsi Biro KSAP yang harus bisa melakukan analisis terhadap isu-isu bilateral/regional/internasional; memberikan dukungan maksimal untuk persidangan di dalam maupun di luar negeri; serta dukungan

penerjemahan baik lisan maupun tertulis, sehingga membutuhkan penguasaan bahasa asing (Inggris) dengan baik serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.

Hal lain yang menjadi kendala adalah karena DPR RI merupakan lembaga politik, seringkali kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat berubah dengan cepat, sehingga dalam memberikan pelayanan seringkali menemui kendala baik di bidang substansi maupun teknis, terutama sekali dalam hal pengiriman delegasi ke luar negeri maupun penerimaan tamu-tamu delegasi dari parlemen luar negeri.

Biro KSAP juga telah mengupayakan berbagai peningkatan dalam kualitas pelayanan sehingga secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro KSAP tahun 2015 dapat dikatakan terlaksana dengan baik, apalagi dengan kesuksesan dalam menyelenggarakan sidang-sidang internasional/regional di Indonesia. Meskipun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan lagi secara optimal guna merespons tuntutan pelayanan kepada Anggota DPR-RI yang semakin hari semakin tinggi. Hasil yang diperoleh ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan seluruh unit kerja di jajaran Biro KSAP.

### **C. PEMECAHAN MASALAH**

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi perlu dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki agar lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada DPR RI khususnya kepada Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) misalnya dengan mengikutsertakan Diklat/pelatihan bagi pegawai;
2. Peningkatan kuantitas SDM yang memiliki penguasaan substansi tentang isu – isu Hubungan Internasional baik di bilateral, regional maupun internasional, serta perlunya peningkatan penguasaan bahasa asing khususnya bagi penerjemah;
3. Pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR-RI dan masyarakat, misalnya penyiaran informasi terbaru tentang BKSAP melalui web site DPR RI baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;
4. Peningkatan sarana/prasarana yang memadai dan modern untuk menunjang seluruh kegiatan di BKSAP.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro KSAP tahun 2014 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2016

**Kepala Biro  
Kerja Sama Antar Parlemen,**

**ttd**

**Drs. H. Saiful Islam, M.Si.  
NIP 19580215 198803 1 001**